



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Selasa

Tanggal: 14 Februari 2017

Halaman: 2

SERUKAN BAWAHAN GUNAKAN HAK PILIH Dianggap Tak Netral, PNS Diadukan

YOGYA (KR) - Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPC PDIP Kota Yogya mengadukan seorang PNS di lingkungan Pemkot Yogya lantaran dinilai tidak netral dalam Pilwali ke Panwas. Dugaan ketidaknetralan tersebut dipicu postingan Plt Kepala Dinas Pariwisata dalam grup aplikasi *whatsapp* UPT Malioboro.

"Harapan kami sangat jelas. Panwas harus menindaklanjuti aduan dan laporan ini. Dalam undang-undang juga diatur jika PNS harus netral," tandas Ketua Bapilu PDIP Kota Yogya Fokki Ardiyanto, Senin (13/2).

Sebelum mengadukan ke Panwas Kota Yogya, pihaknya juga sempat mendatangi Bawaslu DIY. Berbekal hasil *screenshoot* postingan dalam grup aplikasi *whatsapp* UPT Malioboro, ia lantas secara resmi melapor ke Panwas Kota Yogya.

Dikonfirmasi terpisah, Plt Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogya, Yunianto Dwisutono, membantah dugaan tersebut. Postingan yang ia lakukan justru guna menyerukan bawahannya agar menggunakan hak pilih atau tidak golput pada Rabu (15/2) besok.

"UPT Malioboro termasuk Jogoboro bagian

dari pengawasan Dinas Pariwisata. Seharusnya postingan dalam grup *whatsapp* itu dilihat secara utuh. Jangan sampai hanya dilihat sebagian kemudian digunakan untuk kriminalisasi," jelasnya.

Yunianto memaparkan, ia memosting tiga ulasan di dalam grup UPT Malioboro. Postingan pertama tentang ulasan pasangan nomor urut dua. Selang beberapa menit kemudian ia unggah ulasan pasangan nomor urut satu. Kemudian sebagai penutup, ia mengajak bawahannya menggunakan hak pilih dan jangan sampai golput.

Selain itu, postingan tersebut juga bukan argumen pribadinya, melainkan hanya *copy paste* dari grup lain. Di samping itu, postingan juga ia unggah pada Sabtu (4/2) lalu. Sehingga, jika dinilai sebagai bentuk kampanye, seharusnya diadukan saat itu juga.

"Kenapa baru sekarang kalau dipersoalkan. Tapi jika itu membuat ketidaknyamanan dari kedua belah pihak, saya mohon maaf. Saya juga siap diklarifikasi," imbuhnya yang baru saja dipanggil pejabat walikota guna proses klarifikasi.

(Dhi)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Negatif	Segera	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Komisi Pemilihan U			
3. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			
4. BKPP			

Yogyakarta, 04 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005